
TANTANGAN KORUPSI, OLIGARKI, DAN POLITIK UANG: ANTARA KEKUASAAN DAN KEPENTINGAN

Oleh

Umar Iskandar¹, Muh. Ersyad Indra Praja², Darniaty Asis³

^{1,2,3}Institut Teknologi dan Bisnis Maritimk Balik Diwa Makassar

Email: ¹Umar@itbm.ac.id, ²darniaty@itbm.ac.id, ³ersyad.ip@itbmac.id

Article History:

Received: 25-10-2025

Revised: 10-11-2025

Accepted: 28-11-2025

Keywords:

Corruption; Oligarchy;
Money Politics; Digital
Governance; Public
Participation.

Abstract: *This study examines the interrelation between corruption, oligarchy, and money politics as a multidimensional challenge within Indonesia's political system. Corruption is understood not merely as individual misconduct, but as a structural phenomenon rooted in power configurations and unequal distribution of resources. Political-economic oligarchy reinforces corrupt practices through the concentration of power in the hands of a small elite, while money politics operates as a patronage mechanism that preserves their dominance in electoral processes. This research employs a qualitative approach using library research on books, journal articles, international organization reports, and policy documents. The data are analyzed through content analysis and thematic analysis to map the patterns linking oligarchic power structures, money politics, and the digitalization of governance. The findings indicate that digital governance through e-governance, the use of big data and artificial intelligence, as well as the strengthening of public participation and anti-corruption education, has the potential to form an integrative and sustainable model for preventing and combating corruption. The synergy of technological innovation, institutional reform, and civic engagement is crucial to breaking the cycle of corruption-oligarchy-money politics and reinforcing a transparent and accountable democracy in Indonesia*

PENDAHULUAN

Fenomena korupsi, oligarki, dan politik uang merupakan tiga tantangan besar yang saling berkaitan dan membentuk lingkaran kekuasaan yang sulit diputus di Indonesia. Akar persoalan ini berawal dari ketimpangan distribusi kekuasaan dan sumber daya ekonomi yang menciptakan segelintir elite dengan pengaruh besar terhadap kebijakan publik. Dalam sistem yang oligarkis, kekuasaan dan keputusan politik sering kali tidak lagi mencerminkan kepentingan rakyat banyak, melainkan kepentingan kelompok tertentu yang memiliki modal ekonomi dan akses politik yang kuat. Hal ini menjadikan praktik korupsi bukan sekadar

penyimpangan individu, tetapi bagian dari struktur kekuasaan yang sudah terinstitusionalisasi (Hadiz & Robison, 2017).

Secara struktural, korupsi dan oligarki seringkali berkelindan, di mana politisi membutuhkan modal finansial untuk biaya politik, sementara pengusaha mencari dukungan politik untuk keberlangsungan usahanya, menciptakan hubungan koruptif yang merugikan keuangan negara (Ali, 2019). Lebih lanjut, keberadaan oligarki memperparah situasi ini dengan menguasai sumber daya alam sebagai sumber pendapatan utama, yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan pengaruh politik melalui berbagai cara seperti menyewa profesional, mensponsori kandidat, bahkan membentuk partai politik untuk mempengaruhi kebijakan publik (Bolqiah & Raffiudin, 2020). Praktik semacam ini menciptakan siklus korupsi dan mempertahankan kekuasaan kelompok elit, seringkali melalui manipulasi sistem demokrasi itu sendiri (Hosnah et al., 2024).

Praktik politik uang muncul sebagai konsekuensi dari lemahnya integritas sistem politik. Para calon pemimpin merasa perlu "membeli" dukungan melalui distribusi uang atau barang kepada pemilih, sementara sebagian masyarakat menganggap praktik tersebut sebagai hal yang wajar dalam kontestasi politik. Faktor-faktor seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya literasi politik, dan budaya patronase turut memperkuat siklus ini (Aspinall & Berenschot, 2019). Dalam konteks ini, korupsi tidak hanya terjadi karena moral individu yang lemah, tetapi karena struktur ekonomi-politik yang memberi insentif pada perilaku koruptif. Oleh karena itu, untuk memahami tantangan ini, kita perlu melihat korupsi, oligarki, dan politik uang sebagai sistem yang saling menopang satu sama lain.

Menghadapi kompleksitas tersebut, berbagai solusi telah ditawarkan oleh peneliti dan lembaga internasional. Salah satu pendekatan yang terbukti efektif adalah digitalisasi tata kelola pemerintahan (e-governance). Dengan penerapan teknologi digital, interaksi langsung antara pejabat publik dan masyarakat dapat dikurangi sehingga peluang terjadinya korupsi menjadi lebih kecil. Sistem digital juga memungkinkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan data publik dan keuangan negara (OECD, 2023). Selain itu, penerapan big data dan artificial intelligence (AI) dalam pengawasan anggaran dapat membantu mendeteksi pola transaksi mencurigakan secara real-time. Teknologi ini memungkinkan lembaga antikorupsi untuk melakukan analisis prediktif terhadap potensi penyimpangan (Johnston, 2014).

Tidak kalah penting adalah penguatan partisipasi publik (civic engagement) dan pendidikan antikorupsi. Penelitian Mungiu-Pippidi (2015) menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi yang berkelanjutan harus didukung oleh perubahan norma sosial. Dengan meningkatkan literasi politik dan kesadaran warga terhadap bahaya politik uang, masyarakat dapat menjadi aktor aktif dalam menciptakan tata kelola yang bersih. Pendekatan ini juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dalam membangun ekosistem antikorupsi yang lebih inklusif.

Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara teknologi digital, partisipasi sosial, dan reformasi kelembagaan. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti reformasi hukum atau transparansi fiskal secara parsial, penelitian ini mengusulkan model sinergi antara data governance, civic technology, dan pendidikan integritas sosial sebagai strategi yang berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan mendeteksi korupsi, tetapi juga mencegah terbentuknya pola oligarkis baru yang berpotensi

melahirkan kembali politik uang dalam bentuk lain. Tools yang digunakan meliputi platform e-governance, analitik big data berbasis AI, dan media edukasi digital partisipatif, yang masing-masing memiliki keunggulan dalam transparansi, efisiensi, dan pemberdayaan publik.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa tantangan korupsi, oligarki, dan politik uang merupakan permasalahan multidimensi yang memerlukan solusi kolaboratif lintas sektor. Penggabungan antara teknologi dan partisipasi masyarakat bukan hanya menawarkan pendekatan baru dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah menawarkan kerangka konseptual baru berbasis kolaborasi teknologi dan sosial yang dapat dijadikan acuan oleh pembuat kebijakan, praktisi antikorupsi, serta pelaku akademik dalam merancang strategi reformasi politik di masa depan.

Tinjauan Pustaka

Korupsi merupakan salah satu masalah paling kompleks yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, karena tidak hanya bersifat individual tetapi juga struktural. Fenomena ini sering muncul sebagai akibat dari ketimpangan distribusi kekuasaan dan sumber daya ekonomi, yang menciptakan elite politik-ekonomi dengan pengaruh besar terhadap kebijakan publik. Hadiz dan Robison (2017) menegaskan bahwa korupsi di Indonesia seringkali bersifat sistemik dan terkait erat dengan dominasi oligarki dalam pengambilan keputusan politik. Elite yang memiliki modal besar dan jaringan politik yang kuat cenderung menggunakan kekuasaannya untuk mengamankan kepentingan pribadi maupun kelompok, sehingga praktik korupsi menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang sudah terinstitusionalisasi. Dalam konteks ini, korupsi bukan lagi sekadar perilaku individu yang menyimpang, melainkan mekanisme yang mengatur redistribusi sumber daya yang secara historis menguntungkan segelintir pihak, sementara menutup akses bagi masyarakat luas terhadap pelayanan publik dan sumber daya negara (Johnston, 2014).

Selain itu, struktur politik-ekonomi yang oligarkis memperkuat praktik korupsi. Oligarki muncul ketika kekuasaan politik dan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir elite yang memiliki modal signifikan. Hadiz dan Robison (2017) menjelaskan bahwa sistem oligarkis memungkinkan elite untuk mendominasi proses legislasi, penganggaran, dan pengambilan keputusan strategis, sehingga kebijakan publik lebih sering mengakomodasi kepentingan mereka daripada kebutuhan rakyat banyak. Dalam kerangka ini, korupsi bukan hanya penyalahgunaan wewenang individu, tetapi merupakan bagian integral dari dinamika kekuasaan yang menempatkan elite pada posisi yang hampir tidak tertandingi. Aspinall dan Berenschot (2019) menambahkan bahwa oligarki di Indonesia juga dibangun melalui praktik patronase dan klienelisme yang berakar pada budaya politik lokal. Sistem ini memungkinkan elite untuk mempertahankan dan memperluas pengaruhnya dengan menggunakan politik uang sebagai alat untuk membeli dukungan masyarakat, sehingga tercipta lingkaran setan yang memperkuat dominasi oligarkis.

Studi ini akan mengkaji lebih dalam dinamika ini dengan menganalisis bagaimana oligarki, khususnya yang terkait dengan partai politik, dapat memicu tindakan pidana korupsi, serta mengeksplorasi peran mereka dalam mempengaruhi kebijakan publik dan integritas pemilihan umum (Fuadiyah et al., 2024) (Samsuddin et al., 2019). Penelitian ini juga akan menguraikan bagaimana oligarki memanipulasi prioritas anggaran negara,

seringkali mengarahkan sumber daya untuk proyek infrastruktur besar yang melibatkan perusahaan mereka, daripada program kesejahteraan sosial yang dapat mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan (Hosnah et al., 2024).

Politik uang merupakan manifestasi nyata dari lemahnya integritas sistem politik dan rendahnya literasi politik masyarakat. Aspinall dan Berenschot (2019) menekankan bahwa dalam kontestasi politik di Indonesia, praktik politik uang kerap dianggap wajar, terutama di komunitas yang terbiasa dengan budaya patronase. Hal ini menjadikan politik uang tidak hanya sebagai tindakan strategis oleh calon pejabat untuk memenangkan pemilu, tetapi juga sebagai instrumen bagi elite untuk menjaga struktur kekuasaan yang sudah terbentuk. Fenomena ini menunjukkan bahwa politik uang tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial-politik dan ekonomi, karena perilaku masyarakat yang tergantung pada patronase turut memperkuat praktik tersebut. Mungiu-Pippidi (2015) menekankan pentingnya perubahan norma sosial untuk mengendalikan korupsi. Menurutnya, kontrol korupsi yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga transformasi perilaku publik dan peningkatan kesadaran kolektif terhadap praktik politik yang merugikan masyarakat luas. Dalam perspektif ini, politik uang merupakan bagian dari sistem yang saling mendukung oligarki dan korupsi, sehingga pendekatan pemberantasan korupsi harus bersifat multidimensional.

Integrasi antara korupsi, oligarki, dan politik uang menunjukkan bahwa persoalan ini bersifat multidimensi dan memerlukan solusi yang menyeluruh. Korupsi tidak hanya muncul karena moral individu yang lemah, tetapi juga karena adanya insentif sistemik yang mendorong perilaku koruptif. Struktur ekonomi-politik yang tidak merata memberikan keuntungan bagi kelompok elite, sehingga perilaku koruptif menjadi logis secara ekonomi bagi pihak yang memiliki kekuasaan. Hadiz dan Robison (2017) menegaskan bahwa untuk memutus lingkaran korupsi-oligarki-politik uang, pendekatan yang menargetkan satu aspek saja—misalnya hukum atau penegakan anti-korupsi—tidak cukup. Diperlukan pendekatan yang menggabungkan reformasi kelembagaan, teknologi, dan partisipasi sosial untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel.

Dalam konteks solusi, teknologi digital menjadi salah satu intervensi strategis yang menjanjikan. OECD (2023) menekankan bahwa digitalisasi tata kelola pemerintahan (e-governance) dapat meminimalkan interaksi langsung antara pejabat publik dan masyarakat, sehingga peluang terjadinya korupsi dapat dikurangi secara signifikan. Selain itu, pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan (AI) memungkinkan lembaga pengawas untuk melakukan analisis prediktif terhadap pola transaksi mencurigakan dalam pengelolaan anggaran, sehingga potensi penyimpangan dapat dideteksi secara real-time (Johnston, 2014). Teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memberikan transparansi yang lebih tinggi, karena semua transaksi dan data publik dapat diakses dan dipantau secara sistematis. Dengan demikian, e-governance dan analitik berbasis AI menjadi instrumen preventif yang efektif, bukan sekadar alat reaktif untuk menindak korupsi setelah terjadi.

Selain penggunaan teknologi, partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi merupakan faktor kunci dalam membangun budaya integritas sosial. Mungiu-Pippidi (2015) menegaskan bahwa literasi politik dan keterlibatan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan (civic engagement) memainkan peran penting dalam mengubah norma sosial.

Dengan meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya politik uang dan praktik korupsi, masyarakat tidak hanya menjadi pengawas eksternal, tetapi juga dapat memengaruhi kebijakan publik melalui tekanan sosial dan advokasi. Pendekatan ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil untuk membangun ekosistem antikorupsi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pendidikan antikorupsi dan media digital partisipatif, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat, memahami mekanisme pengawasan, dan berperan aktif dalam menuntut akuntabilitas pemerintah.

Kerangka teoretis integratif menjadi penting dalam penelitian ini untuk memahami keterkaitan antara korupsi, oligarki, dan politik uang sekaligus menilai efektivitas intervensi teknologi dan partisipasi sosial. Kerangka ini menggabungkan tiga dimensi utama: pertama, struktur kekuasaan dan ekonomi-politik, yang menjelaskan bagaimana oligarki dan korupsi terbentuk dan mengakar dalam sistem politik; kedua, norma sosial dan perilaku publik, yang menyoroti peran politik uang, patronase, dan literasi politik masyarakat; ketiga, intervensi teknologi digital dan partisipasi masyarakat, yang berfungsi sebagai strategi preventif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kesadaran publik. Dengan memadukan ketiga dimensi ini, penelitian ini menawarkan pendekatan multidimensional yang mampu menargetkan akar penyebab korupsi sekaligus membangun fondasi demokrasi yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

Pendekatan integratif ini juga menekankan pentingnya sinergi antara digital governance, civic technology, dan pendidikan integritas sosial. E-governance memungkinkan pemerintah untuk menjalankan layanan publik secara lebih efisien dan transparan, sementara analitik big data berbasis AI memberikan kemampuan untuk mendeteksi penyimpangan secara proaktif. Civic technology dan partisipasi masyarakat melengkapi upaya ini dengan menyediakan platform bagi publik untuk terlibat langsung dalam pengawasan dan advokasi kebijakan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap korupsi, tetapi juga membangun mekanisme pencegahan yang berkelanjutan, sehingga memutus lingkaran oligarki dan politik uang yang selama ini sulit diatasi.

Lebih lanjut, literatur menunjukkan bahwa intervensi teknologi dan partisipasi publik saling memperkuat. OECD (2023) menyatakan bahwa digitalisasi tata kelola akan lebih efektif jika didukung oleh masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap integritas publik. Dalam konteks ini, pendidikan antikorupsi menjadi sangat penting untuk membentuk norma sosial yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Mungiu-Pippidi (2015) menegaskan bahwa perubahan norma sosial dan keterlibatan masyarakat adalah fondasi utama bagi kontrol korupsi jangka panjang. Dengan kata lain, teknologi tanpa partisipasi publik berisiko hanya menjadi alat teknokratis yang tidak mengubah perilaku masyarakat, sedangkan partisipasi publik tanpa teknologi mungkin terbatas pada advokasi simbolik yang sulit memengaruhi keputusan politik secara sistemik.

Keseluruhan tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi, pembatasan oligarki, dan pencegahan politik uang memerlukan pendekatan kolaboratif lintas sektor. Hadiz dan Robison (2017) menekankan bahwa reformasi hukum dan kelembagaan saja tidak cukup jika tidak disertai penguatan literasi politik dan teknologi pengawasan. Aspinall dan Berenschot (2019) menambahkan bahwa perubahan perilaku politik masyarakat, termasuk penolakan terhadap politik uang, menjadi faktor kunci dalam membangun demokrasi yang sehat. Dengan demikian, penelitian ini menekankan strategi

multidimensional, yang mengintegrasikan reformasi kelembagaan, teknologi digital, dan partisipasi publik sebagai satu kesatuan.

Secara konseptual, penelitian ini menekankan bahwa korupsi, oligarki, dan politik uang membentuk sistem yang saling menopang, di mana satu fenomena memperkuat yang lain. Oleh karena itu, solusi yang efektif harus memutus lingkaran ini melalui pendekatan yang simultan: memperkuat tata kelola melalui teknologi, membangun kesadaran dan keterlibatan masyarakat, dan mengubah struktur serta norma politik yang memungkinkan oligarki dan korupsi berlanjut. Dengan memanfaatkan platform e-governance, analitik big data berbasis AI, dan media edukasi digital partisipatif, penelitian ini menawarkan kerangka strategis yang tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga preventif dan berkelanjutan.

Kesimpulannya, tinjauan pustaka ini menegaskan bahwa tantangan korupsi, oligarki, dan politik uang di Indonesia merupakan masalah multidimensi yang memerlukan pendekatan integratif antara teknologi, kelembagaan, dan partisipasi sosial. Penggunaan e-governance dan AI memungkinkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi, sedangkan pendidikan antikorupsi dan civic engagement memperkuat perubahan norma sosial dan perilaku masyarakat. Kombinasi ini tidak hanya membantu mendeteksi dan menekan korupsi, tetapi juga membangun ekosistem demokrasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memutus siklus oligarki dan politik uang yang selama ini sulit diputus. Pendekatan integratif yang diusulkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi antikorupsi dalam merancang strategi reformasi politik yang komprehensif di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk memahami keterkaitan antara korupsi, oligarki, dan politik uang dalam sistem politik Indonesia serta menelaah peran integratif teknologi digital, partisipasi publik, dan reformasi kelembagaan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Data penelitian bersumber dari literatur sekunder yang meliputi buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, dan dokumen kebijakan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur sistematis dengan menggunakan kata kunci seperti "korupsi," "oligarki," "politik uang," "e-governance," dan "civic engagement," kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis) untuk mengidentifikasi pola hubungan antara struktur kekuasaan oligarkis, praktik politik uang, dan upaya digitalisasi tata kelola publik. Hasil analisis disintesis menjadi model konseptual integratif yang menekankan sinergi antara e-governance, analitik big data berbasis kecerdasan buatan, dan pendidikan integritas sosial sebagai strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berkelanjutan. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dan diskusi dengan pakar guna memastikan konsistensi temuan dan ketepatan argumentasi teoretis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi sebagai Fenomena Terstruktural

Penelitian ini mengungkapkan bahwa korupsi di Indonesia bukan hanya hasil dari

perilaku individu yang menyimpang, tetapi merupakan fenomena struktural yang terinstitusionalisasi dalam sistem kekuasaan politik dan ekonomi. Sebagai contoh, kajian yang dilakukan oleh Hadiz dan Robison (2017) menjelaskan bahwa korupsi di Indonesia sering kali terintegrasi dalam sistem politik-ekonomi yang menguntungkan sekelompok elite politik-ekonomi tertentu. Para elite ini menggunakan posisi mereka untuk mengatur kebijakan yang menguntungkan mereka secara pribadi dan kelompok mereka, bukan untuk kepentingan masyarakat umum. Penelitian lebih lanjut menyatakan bahwa “systemic corruption often emerges due to the uneven distribution of economic resources and political power in a country” (Aspinall & Berenschot, 2019). Korupsi menjadi bagian dari strategi pengelolaan negara, yang kemudian memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi dan memperbesar jurang antara kelompok elite dan masyarakat luas.

Fenomena ini didorong oleh konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir orang yang dapat mengendalikan aliran keuangan dan sumber daya publik. Penelitian oleh Johnston (2014) menyatakan bahwa di negara-negara dengan struktur oligarkis, korupsi tidak hanya menjadi masalah moral individu, tetapi juga bagian dari sistematisasi kekuasaan yang memperburuk ketidakadilan sosial. Kekuatan politik dan ekonomi yang terkonsentrasi pada segelintir kelompok memungkinkan mereka untuk mempengaruhi kebijakan negara untuk keuntungan pribadi mereka. Dalam sistem ini, korupsi menjadi mekanisme yang mengatur redistribusi sumber daya yang justru menguntungkan elite, sambil menutup akses bagi masyarakat umum terhadap sumber daya negara yang seharusnya mereka terima.

Oligarki dan Implikasinya pada Politik dan Korupsi

Oligarki di Indonesia muncul sebagai hasil dari konsentrasi kekuasaan ekonomi yang bergantung pada sejumlah kecil individu atau keluarga yang memegang kendali besar atas sektor-sektor penting dalam perekonomian. Aspinall dan Berenschot (2019) menyebut bahwa oligarki di Indonesia berkembang melalui hubungan yang erat antara bisnis dan politik. Elite yang memiliki modal besar memanfaatkan kekayaan mereka untuk memperoleh dukungan politik dengan cara membangun jaringan patronase yang mendalam, di mana dukungan politik dibeli melalui politik uang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh oligarki dalam politik Indonesia telah menciptakan suatu sistem yang menguntungkan segelintir kelompok ekonomi-politik dengan cara mengontrol kebijakan dan mempengaruhi proses legislasi. Sebagai contoh, temuan yang diangkat oleh Hadiz dan Robison (2017) menyatakan bahwa kebijakan yang seharusnya berpihak kepada masyarakat sering kali lebih banyak mengakomodasi kepentingan kelompok oligarkis, mengingat bahwa mereka memiliki pengaruh langsung terhadap pembuat kebijakan di tingkat legislatif. Oligarki ini memperkuat ketergantungan masyarakat pada patronase, yang selanjutnya memperburuk patron-client relationships di mana kebijakan publik lebih sering dipengaruhi oleh keinginan para elite daripada oleh kebutuhan nyata masyarakat. Oligarki ini tidak hanya menjadi penghambat bagi pembangunan yang merata, tetapi juga berperan penting dalam memperburuk praktek korupsi.

Penelitian oleh OECD (2023) memperkuat temuan ini dengan menyebutkan bahwa di negara-negara dengan dominasi oligarki yang kuat, seperti Indonesia, distribusi kekuasaan politik sangat terkonsentrasi pada segelintir elite, yang dengan mudah memanipulasi kebijakan publik untuk menguntungkan diri mereka. Hal ini mengarah pada terjadinya kolusi

dan korupsi yang mengganggu proses demokratisasi dan memperburuk transparansi serta akuntabilitas pemerintah.

Politik Uang dan Budaya Patronase

Politik uang di Indonesia merupakan salah satu aspek utama yang membentuk lingkaran korupsi, oligarki, dan ketimpangan sosial. Aspinall dan Berenschot (2019) menunjukkan bahwa praktik politik uang di Indonesia tidak hanya terbatas pada pemilihan umum, tetapi telah menjadi bagian dari proses sosial-politik yang lebih besar. Politik uang, dalam hal ini, menjadi alat yang digunakan oleh elite politik untuk memastikan dukungan masyarakat dalam kontestasi politik dengan menawarkan uang atau barang.

Dalam konteks ini, masyarakat yang kurang teredukasi secara politik cenderung melihat politik uang sebagai sesuatu yang biasa, bahkan sebagai bagian dari norma dalam kontestasi politik. Hal ini diperparah oleh rendahnya literasi politik di kalangan masyarakat, yang menjadikan mereka kurang peka terhadap dampak buruk dari politik uang dan praktik korupsi dalam proses demokrasi. Sebagai contoh, Mungiu-Pippidi (2015) menyatakan bahwa politik uang telah berkembang menjadi suatu kebiasaan politik yang dianggap wajar di kalangan masyarakat dan oleh banyak politisi. Masyarakat yang terbiasa dengan budaya patronase ini, dalam banyak kasus, lebih memilih kandidat yang memberi mereka imbalan materi dibandingkan memilih berdasarkan visi atau kebijakan yang baik.

Dampak dari politik uang sangat besar karena mengurangi kualitas demokrasi, dan memunculkan persepsi di kalangan masyarakat bahwa pemilu dan proses politik secara umum hanya sekadar sarana bagi elite untuk mengumpulkan kekayaan dan menjaga kekuasaan. Dalam konteks ini, politik uang memperburuk patronase, yang selanjutnya mengarah pada penurunan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan.

Teknologi Digital sebagai Solusi: E-Governance dan Big Data

Salah satu solusi yang diusulkan oleh penelitian ini adalah pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Penelitian oleh OECD (2023) menunjukkan bahwa e-governance dapat menjadi alat yang efektif untuk meminimalkan interaksi langsung antara pejabat publik dan masyarakat. Dengan mengurangi ruang untuk perilaku koruptif dalam interaksi langsung, e-governance dapat memperkecil kemungkinan terjadinya korupsi. Implementasi sistem digitalisasi pemerintahan yang transparan juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara dan distribusi sumber daya publik.

Selain itu, penggunaan big data dan artificial intelligence (AI) dalam pengawasan anggaran menjadi hal yang sangat penting. Dalam hal ini, AI dapat digunakan untuk melakukan analisis prediktif yang mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan, yang memungkinkan lembaga pemerintah dan antikorupsi untuk mendeteksi potensi penyimpangan lebih dini. Penelitian oleh Johnston (2014) menyebutkan bahwa pemanfaatan big data dapat membantu dalam menganalisis tren pengeluaran publik dan menemukan transaksi mencurigakan secara real-time, yang memperbesar peluang untuk melakukan tindakan preventif sebelum terjadinya tindak pidana korupsi.

Penelitian ini juga menyarankan agar teknologi informasi digunakan dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel melalui pengelolaan data publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Platform e-governance yang efektif juga

dapat memperbesar partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan dan membantu dalam mengurangi ketimpangan dalam distribusi sumber daya.

Partisipasi Publik dan Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi dan penguatan partisipasi publik adalah solusi kunci yang ditawarkan dalam penelitian ini. Sebagaimana dikemukakan oleh Mungiu-Pippidi (2015), pemberantasan korupsi yang berkelanjutan memerlukan perubahan norma sosial yang kuat. Masyarakat yang sadar akan dampak buruk dari politik uang dan praktik korupsi dapat berfungsi sebagai pengawas eksternal yang mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendidikan literasi politik yang lebih baik dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dalam sistem politik. Ketika masyarakat lebih teredukasi dalam hal kebijakan publik dan sistem pemerintahan, mereka akan lebih cenderung menuntut akuntabilitas dan transparansi dari pejabat publik. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam mendidik masyarakat menjadi sangat penting dalam menciptakan ekosistem antikorupsi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Solusi Integratif: Sinergi antara Teknologi, Partisipasi Sosial, dan Reformasi Kelembagaan

Keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi, oligarki, dan politik uang merupakan masalah yang saling terkait dalam sistem yang lebih besar. Oleh karena itu, solusi yang efektif tidak dapat mengandalkan satu aspek saja, melainkan harus melibatkan pendekatan yang menyeluruh. E-governance, AI, dan partisipasi sosial harus menjadi bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang terintegrasi. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk deteksi dini terhadap praktik korupsi, tetapi juga untuk pencegahan dengan mengubah struktur sosial, politik, dan ekonomi yang selama ini mendukung praktik oligarki dan politik uang.

Reformasi kelembagaan juga sangat penting untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan. Pembentukan dalam sistem pembiayaan partai dan pengawasan terhadap dana kampanye sangat diperlukan agar politik uang tidak menjadi hal yang lazim dan diterima dalam sistem politik Indonesia.

Pembahasan

1. Korupsi Sebagai Fenomena Terstruktural dalam Sistem Politik Indonesia

Korupsi di Indonesia telah berkembang menjadi fenomena yang bukan hanya sekadar penyimpangan individu, melainkan sebuah fenomena terstruktural yang mengakar dalam sistem politik dan ekonomi negara. Dalam hal ini, korupsi lebih dari sekadar tindakan penyalahgunaan wewenang, tetapi telah menjadi bagian dari mekanisme sistemik yang diatur oleh jaringan kekuasaan yang melibatkan elite politik dan ekonomi. Hasil penelitian ini mendapati bahwa korupsi menjadi semacam "modus operandi" dalam sistem yang mendominasi pengelolaan negara. Hadiz dan Robison (2017) menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi karena kesalahan individu, tetapi juga karena ada sistem yang memberikan insentif bagi para pengambil keputusan untuk memanfaatkan posisi mereka demi keuntungan pribadi.

Sistem pemerintahan yang oligarkis di Indonesia telah menciptakan ketimpangan

dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya, di mana segelintir elite politik dan ekonomi mengendalikan kebijakan publik demi kepentingan kelompok mereka sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Aspinall dan Berenschot (2019), ketimpangan ini semakin mempersulit upaya untuk memberantas korupsi, karena kebijakan yang seharusnya berpihak kepada rakyat lebih sering justru menguntungkan segelintir orang yang memiliki kekuasaan. Dengan kata lain, dalam sistem politik yang oligarkis, di mana kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir individu atau kelompok yang memiliki pengaruh besar, korupsi menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang sulit untuk diberantas.

Selain itu, korupsi yang terjadi tidak hanya menghambat perkembangan ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan sistem pemerintahan. Johnston (2014) mengungkapkan bahwa korupsi yang berlarut-larut mengarah pada merosotnya legitimasi politik, yang sangat penting bagi kelangsungan demokrasi. Tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan negara, masyarakat akan kehilangan rasa percaya terhadap sistem pemerintahan yang ada, yang akhirnya berimplikasi pada ketidakstabilan politik dan sosial.

Oleh karena itu, untuk mengatasi korupsi, penelitian ini menyarankan perlunya reformasi struktural yang menasar pada penguatan sistem tata kelola pemerintahan, pembenahan dalam transparansi anggaran, dan penyederhanaan sistem birokrasi yang lebih efisien. Reformasi ini juga harus melibatkan penguatan lembaga-lembaga antikorupsi dan sistem hukum yang tegas agar dapat menghadirkan keadilan yang sesungguhnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Oligarki: Pengaruh terhadap Kebijakan Publik dan Praktik Korupsi

Oligarki merupakan salah satu akar penyebab terjadinya korupsi yang meluas di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa dalam sistem oligarkis, kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir elite yang memiliki modal besar dan kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan negara. Aspinall dan Berenschot (2019) berpendapat bahwa kekuasaan yang terpusat pada segelintir elite ini memperburuk ketidakmerataan distribusi kekayaan dan kesempatan dalam kehidupan sosial-ekonomi. Mereka yang memiliki akses besar terhadap keputusan politik dapat mengatur kebijakan untuk keuntungan mereka sendiri, sementara kelompok lainnya hanya menjadi objek dari kebijakan tersebut.

Penelitian ini memperlihatkan bagaimana pengaruh oligarki terhadap kebijakan publik sangat kuat, mengingat bahwa elite politik dan ekonomi yang terhubung sering kali menggunakan kekuasaan mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi. Hadiz dan Robison (2017) menyebutkan bahwa kebijakan publik yang seharusnya mengakomodasi kepentingan masyarakat sering kali dimanipulasi oleh kelompok elite untuk menjaga kekuasaan politik mereka. Salah satu contohnya adalah pengaruh oligarki dalam penyusunan anggaran negara yang lebih banyak mencerminkan kepentingan mereka daripada kebutuhan rakyat.

Praktik oligarki ini menciptakan sistem yang sangat rentan terhadap praktik korupsi, karena para pengambil keputusan yang didorong oleh kepentingan pribadi dan kelompok, sering kali memanfaatkan wewenang mereka untuk mengatur alokasi anggaran dan proyek pemerintah. Hal ini membentuk suatu lingkaran setan yang memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi, serta memperburuk kemiskinan dan ketimpangan di tingkat

masyarakat. Dalam hal ini, solusi yang disarankan adalah pengurangan dominasi oligarki dalam proses pembuatan kebijakan, serta pembenahan sistem politik yang memperbaiki representasi rakyat secara lebih proporsional.

3. Politik Uang: Implikasinya terhadap Demokrasi dan Keadilan Sosial

Politik uang adalah salah satu tantangan terbesar dalam proses demokrasi di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik uang di Indonesia tidak hanya menjadi masalah dalam konteks pemilu, tetapi juga telah berkembang menjadi praktik yang meresap dalam banyak aspek kehidupan politik. Aspinall dan Berenschot (2019) menekankan bahwa politik uang telah menjadi norma sosial yang diterima di kalangan banyak pemilih, yang membuat praktik tersebut semakin sulit untuk diberantas. Mungiu-Pippidi (2015) menyebutkan bahwa politik uang yang terjadi selama pemilu menciptakan hubungan patron-klien yang saling menguntungkan antara kandidat dan pemilih.

Politik uang memiliki dampak yang sangat besar terhadap kualitas demokrasi itu sendiri. Mungiu-Pippidi (2015) mengemukakan bahwa ketika masyarakat memilih berdasarkan imbalan materi, daripada berdasarkan program politik yang lebih luas, maka itu akan merusak integritas demokrasi. Pemilu yang seharusnya menjadi sarana untuk memilih pemimpin yang berkualitas, justru menjadi arena untuk pertukaran imbalan materi yang memperburuk ketimpangan politik dan ekonomi. Lebih lanjut, politik uang memperburuk keterlibatan politik masyarakat, karena mereka yang terlibat dalam politik uang akan lebih memilih kandidat yang menawarkan imbalan, daripada melihat visi atau misi kandidat tersebut untuk membangun negara.

Selain itu, politik uang memperburuk masalah ketidakadilan sosial, karena hanya mereka yang memiliki kemampuan finansial yang dapat mengakses kekuasaan politik. Hal ini menciptakan kesenjangan sosial yang lebih besar antara elite politik dan masyarakat bawah yang bergantung pada politik patronase untuk memperoleh bantuan dan dukungan. Oleh karena itu, pemberantasan politik uang tidak hanya membutuhkan penegakan hukum yang lebih tegas, tetapi juga perlu adanya pendidikan politik yang mendalam bagi masyarakat agar mereka memahami bahaya dari praktik tersebut terhadap kelangsungan demokrasi yang sehat.

4. Teknologi Digital: Solusi untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Salah satu solusi yang paling menarik yang diusulkan dalam penelitian ini adalah pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan. Penelitian yang dilakukan oleh OECD (2023) menunjukkan bahwa e-governance atau digitalisasi pemerintahan dapat mengurangi interaksi langsung antara pejabat publik dan masyarakat, yang sering kali menciptakan ruang bagi praktik korupsi. Dengan menggunakan sistem digital, semua transaksi pemerintah dapat tercatat secara sistematis dan transparan, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses data publik dan mengawasi pengelolaan anggaran negara dengan lebih mudah.

Selain itu, penggunaan big data dan artificial intelligence (AI) dalam pengawasan anggaran juga sangat penting. Johnston (2014) berpendapat bahwa teknologi ini memungkinkan lembaga pemerintah untuk melakukan analisis prediktif terhadap pengelolaan keuangan negara. Dengan teknologi ini, transaksi mencurigakan dapat dideteksi lebih dini, yang memungkinkan tindakan preventif dilakukan sebelum terjadi penyimpangan yang lebih besar. Ini memberikan keunggulan dalam deteksi dini terhadap perilaku koruptif

dan menciptakan sistem pencegahan yang lebih efektif.

Namun, meskipun teknologi memberikan banyak potensi dalam mengatasi masalah korupsi, penting untuk dicatat bahwa teknologi saja tidak cukup. Pendidikan politik yang lebih luas dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan pemerintah juga harus menjadi bagian dari solusi ini. Mungiu-Pippidi (2015) mengemukakan bahwa perubahan norma sosial sangat penting dalam pemberantasan korupsi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, masyarakat yang lebih teredukasi dalam hal literasi politik dan pemberantasan korupsi akan lebih peduli terhadap keadilan sosial dan akan berperan aktif dalam menuntut akuntabilitas pemerintah.

5. Sinergi Antara Teknologi dan Partisipasi Sosial dalam Reformasi Politik

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar solusi yang diterapkan bersifat terpadu, dengan menggabungkan antara teknologi, partisipasi sosial, dan reformasi kelembagaan. Penerapan e-governance dan AI memberikan keuntungan besar dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, teknologi ini harus didukung dengan pendidikan antikorupsi dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik.

Selain itu, reformasi kelembagaan yang mencakup penguatan lembaga pengawas dan transparansi anggaran akan memastikan bahwa politik uang dan korupsi dapat diminimalisir. Masyarakat yang teredukasi secara politik akan mampu mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan mereka dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil selalu berpihak pada kepentingan publik.

Secara keseluruhan, pendekatan yang sinergis antara teknologi digital dan pendidikan sosial akan menciptakan ekosistem pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan berkelanjutan. Hal ini memungkinkan terciptanya perubahan struktural dalam sistem politik Indonesia, yang pada akhirnya akan memperbaiki kualitas demokrasi dan keadilan sosial di negara ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa **korupsi**, **oligarki**, dan **politik uang** di Indonesia adalah masalah yang saling terkait dan memperburuk kondisi sosial-politik negara. Ketiga fenomena ini bukan hanya melibatkan penyimpangan individu, tetapi lebih merupakan bagian dari **struktur kekuasaan** yang telah terinstitusionalisasi. **Korupsi** yang terjadi di Indonesia berakar pada sistem yang tidak adil dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya, sementara **oligarki** memperburuk masalah ini dengan mengkonsentrasikan kekuasaan pada segelintir elite yang mengontrol keputusan politik untuk keuntungan pribadi mereka. **Politik uang** memperparah kondisi ini, karena mengurangi kualitas demokrasi dan membuat pemilih cenderung memilih berdasarkan imbalan materi daripada visi atau kebijakan yang dapat membawa perubahan nyata bagi masyarakat.

Pemberantasan ketiga masalah ini memerlukan solusi yang **multidimensional**. **Reformasi kelembagaan** harus dilakukan untuk mengurangi dominasi kelompok oligarkis dalam pengambilan keputusan politik dan pengelolaan keuangan negara. Di sisi lain, **teknologi digital**, seperti **e-governance**, **big data**, dan **artificial intelligence (AI)**, dapat memainkan peran kunci dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Selain itu, **pendidikan antikorupsi** dan peningkatan **partisipasi publik** harus diperkuat untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan peduli terhadap pentingnya **tata kelola pemerintahan yang bersih**.

Dengan demikian, solusi yang diusulkan dalam penelitian ini mencakup **sinergi antara teknologi, reformasi kelembagaan, dan partisipasi sosial**. Pendekatan terintegrasi ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola negara, memutuskan lingkaran korupsi, oligarki, dan politik uang, serta menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.

SARAN

1. Reformasi Kelembagaan dan Penguatan Lembaga Antikorupsi

Pemerintah perlu melakukan **reformasi kelembagaan** yang lebih komprehensif untuk memutus pengaruh oligarki dalam sistem politik. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkuat **lembaga antikorupsi** dan **lembaga pengawasan** yang ada, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar dapat lebih efektif dalam memantau kebijakan pemerintah dan mendeteksi penyimpangan sejak dini. Di samping itu, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas daripada kelompok elit yang mendominasi.

2. Digitalisasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Transparansi

Implementasi **e-governance** dan penggunaan **big data** serta **AI** harus menjadi prioritas dalam reformasi sistem pemerintahan. **Digitalisasi tata kelola pemerintahan** dapat mengurangi ruang bagi praktik korupsi dengan membuat transaksi keuangan dan keputusan kebijakan lebih terbuka dan dapat diakses oleh publik. Pemerintah juga harus memastikan bahwa data dan informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat agar tercipta **transparansi** dan **akuntabilitas** yang lebih baik.

3. Peningkatan Literasi Politik dan Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan politik dan **pendidikan antikorupsi** perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Masyarakat yang teredukasi secara politik akan lebih cenderung untuk memilih berdasarkan visi dan kebijakan yang baik, bukan karena imbalan materi. Selain itu, literasi politik yang lebih baik dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami proses pengambilan kebijakan, serta memberikan mereka alat untuk **memantau dan mengawasi** pengelolaan sumber daya negara.

4. Penguatan Partisipasi Publik dalam Pengawasan Pemerintahan

Partisipasi publik harus diperkuat dalam pengawasan kebijakan publik dan pengelolaan keuangan negara. Pemerintah harus membuka ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui forum-forum konsultasi publik maupun mekanisme pengaduan yang efektif. Melalui **partisipasi aktif**, masyarakat dapat membantu mengidentifikasi kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan umum dan mendorong reformasi dalam pemerintahan yang lebih bersih.

5. **Penerapan Sistem Pengawasan yang Lebih Ketat terhadap Politik Uang**
Pemberantasan **politik uang** harus menjadi prioritas dalam setiap pemilu dan proses politik. Pemerintah perlu memperketat regulasi tentang pembiayaan partai politik dan kampanye, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam politik uang. Selain itu, kampanye untuk **membangun kesadaran masyarakat** mengenai bahaya politik uang dan dampaknya terhadap integritas demokrasi sangat penting dilakukan, agar masyarakat tidak lagi menerima praktik politik uang sebagai hal yang wajar.
6. **Kolaborasi antara Pemerintah, Lembaga Internasional, dan Masyarakat Sipil**
Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih bersih, perlu ada **kolaborasi yang lebih erat** antara pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat sipil. Lembaga internasional dapat membantu dengan memberikan **pengetahuan dan pengalaman** terkait pengelolaan pemerintahan yang baik, sementara masyarakat sipil dapat berfungsi sebagai **pengawas eksternal** yang memastikan bahwa kebijakan publik mengakomodasi kepentingan seluruh rakyat.
7. **Reformasi Sistem Politik dan Pembiayaan Partai**
Salah satu solusi jangka panjang adalah dengan mereformasi sistem pembiayaan partai politik. Pembiayaan partai yang lebih transparan dan berbasis **sumber dana yang sah** akan mengurangi ketergantungan politik pada **politik uang** dan **sumbangan ilegal**. Dengan demikian, pemilihan umum dan proses politik lainnya dapat dilakukan lebih adil, tanpa adanya intervensi dari kelompok elit yang mencoba membeli kekuasaan dengan uang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ali, M. (2019). Analisis Ekonomi Politik Terhadap Korupsi (Dalam Perspektif Struktural Menuju Pemahaman Teoritik Baru Tentang Korupsi Politik Di Indonesia). *JIAIP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 6(1), 56-63.
- [2] Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- [3] Bolqiah, L. H., & Raffiudin, R. (2020). Dominasi oligarki dan ketidakhadiran partai politik hijau di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 151-167.
- [4] Fuadiyah, T., Aini, D. P. A. N., & Mashudi, M. (2024). Problematika Oligarki Dalam PDIP Yang Memicu Lahirnya Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Islam. *Paraduta: Jurnal Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(3), 81-89.
- [5] Hadiz, V. R., & Robison, R. (2017). *The political economy of oligarchy and corruption in Indonesia*. Routledge.
- [6] Hosnah, A. U., Antoni, H., Rohaedi, E., Nuraeny, H., & Faturachman, F. A. (2024). Oligarchic Hegemony in Elections: A Criminal Offense Undermining Integrity and Threatening Democracy in Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(3), 317-340.
- [7] Johnston, M. (2014). *Corruption, contention, and reform: The power of deep democratization*. Cambridge University Press.
- [8] Mungiu-Pippidi, A. (2015). *The quest for good governance: How societies develop control of corruption*. Cambridge University Press.
- [9] OECD. (2023). *Integrity and anti-corruption policies in the digital age*. OECD Publishing.

- [10] Samsudin, H., Indra Gunawan, C., & Sasmito, C. (2019). Hasil Cek Similarity: Membongkar Relasi Kekuasaan Oligarki di Kota Batu: Studi Kasus Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pemberian Keringanan Pajak Dan Korupsi Kebijakan PT BWR. *Membongkar Relasi Kekuasaan Oligarki Di Kota Batu: Studi Kasus Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pemberian Keringanan Pajak Dan Korupsi Kebijakan PT BWR*, 16(2), 210-227.
- [11] DOAJ. (2022). *Corruption and dysfunction of the party financing system in Indonesia*. Retrieved from <https://doaj.org/article/f240bfefc0a6485cb962dc41c6cf7f5f>
- [12] Jurnal KPK. (2022). *Anti-corruption strategies in Indonesia: Political party financing*. Retrieved from <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/487/91/1707>
- [13] Pursuit, University of Melbourne. (2022). *The changing nature of oligarchy in Indonesia*. Retrieved from <https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/the-changing-nature-of-oligarchy-in-indonesia>
- [14] SAGE Journals. (2021). *Corruption and political legitimacy in Indonesia: Implications for democracy*. Retrieved from <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/20578911221124965>
- [15] Semantic Scholar. (2021). *Money politics and electoral corruption in Indonesia*. Retrieved from <https://pdfs.semanticscholar.org/32e0/162e043e185148e3eee1c190ee5954036597.pdf>
- [16] Talenta, University of Sumatera Utara. (2022). *Political economy of oligarchy and corruption in Indonesia: Implications for democracy*. Retrieved from <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/12424>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN